

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Nomor SOP	OT.01.02-024-055.De.3					
Tanggal Pembuatan	Kamis, 09 November 2017					
Tanggal Revisi	Revisi ke					
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018					
Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM					

Jhoni Ginting, S.H., M.H.

NIP. 196106121989031003

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:					
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang					
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	Pemajuan dan Perlindungan HAM					
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan					
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik					
Kerja Kemenko Polhukam	4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik					
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019	5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik					
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam						
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan:					
1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi					
Pemajuan dan Perlindungan HAM	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)					
	3. Kendaraan roda dua dan empat					
	4. Telepon, Faksimile, dsb					
	1010[021, 1 0110111110, 000					
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :					
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan	Disimpan dalam data elektronik dan manual					
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM						

Disahkan oleh

Judul SOP Mikro

SOP Mikro Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Asdep	Kabid	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kabid terkait dan Analis untuk menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM				Arahan Deputi, Rencana Kerja, dsb	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM				Disposisi/arahan Asdep	60 Menit	Koordinasi dan Konsultasi teknis + Disposisi	
3	Menyiapkan bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM kemudian disampaikan kepada Kabid untuk diperiksa		Т	-	Koordinasi dan Konsultasi teknis + Disposisi	360 Menit	Bahan/materi	
4	Meneliti bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tentang isu di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM, jika setuju dilaporkan kepada Asdep, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki	Т	*		Bahan/materi	120 Menit	Bahan/materi yang telah diteliti	
5	Memeriksa bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM jika setuju dijadikan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk di diperbaiki	Y	Y		Bahan/materi yang telah diteliti		Bahan/materi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	